1. Nama Unit Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik serta di bidang penelitian dan pengembangan.
3. Fungsi :
    a. penyusunan program kerja di bidang perencanaan pembangunan daerah ;
    b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta pengolahan data statistik dan tata ruang daerah ;
    c. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
    d. pemberian dukungan atas penyelenggaaran pemerintahan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah ;
    e. pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi penelitian dan pengembangan, pengolahan data statistik, pengembangan prasarana wilayah dan tata ruang, pemerintahan, sosial dan budaya serta ekonomi;
    f. penyelenggara urusan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan, urusan di bidang statistik, penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan sebagaian urusan dibidang penataan ruang ;
    g. penanggung jawab pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan daerah;
    h. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta ketatausahaan Badan;
    i. pembinaan dan pengawasan terhadap dan kelompok jabatan fungsional ; dan
    j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Uraian	Sumber data
1.	Pertumbuhan PDRB ADHK (Pertumbuhan Ekonomi) (%)	Primer
2.	Laju Inflasi (%)	Primer
3.	PDRB per Kapita ADHB (Ribu Rupiah)	Primer
4.	Indeks Gini	Primer
5.	Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) ADHK	Primer
6.	Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%)	Primer
7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Primer
8.	Daya Beli Masyarakat (Ribu Rupiah)	Primer
9.	Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan (%)	Primer
10.	Jumlah dokumen penataan ruang kecamatan (buah)	Primer
11.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh (buah)	Primer
12.	Jumlah dokumen perencanaan kota (buah)	Primer
13.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi (buah)	Primer
14.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya (buah)	Primer

15.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah (buah)	Primer
16.	Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam (buah)	Primer
17.	Jumlah dokumen pengendalian evaluasi monitoring (buah)	Primer
18.	Jumlah MoU kerjasama antar pemerintah daerah (buah)	Primer
19.	Jumlah dokumen statistik dasar sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan (buah)	Primer
20.	Persentase SKPD yang memiliki buku profil/statistik SKPD (%)	Primer
21.	Nilai Tukar Petani	Primer
22.	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (rupiah)	Primer
23.	Luas wilayah (ha)	Primer
24.	Luas wilayah produktif (ha)	Primer
25.	Luas wilayah industri (ribu ha)	Primer
26.	Luas wilayah kebanjiran (ribu ha)	Primer
27.	Luas wilayah kekeringan (ribu ha)	Primer
28.	Luas wilayah perkotaan (ribu ha)	Primer

29.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer
30.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer
31.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer
32.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer
33.	Buku “Kabupaten Dalam Angka”	Primer
34.	Buku “PDRB Kabupaten”	Primer